

**UPAYA PENANGGULANGAN BENCANA DI  
KABUPATEN SUMENEP  
(Studi di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumenep)**

***DISASTER MANAGEMENT EFFORTS IN  
SUMENEP DISTRICT  
(Study at the Sumenep Regency Regional Disaster Management Agency)***

Oleh :

Surya ningsih<sup>1\*\*</sup>, Ida Syafriani<sup>2</sup>, Rillia Aisyah Haris<sup>3</sup>

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Prodi Administrasi Publik  
Universitas Wiraraja

E-Mail: [ningsihmengmong154@gmail.com](mailto:ningsihmengmong154@gmail.com), [Idafisipunija@gmail.com](mailto:Idafisipunija@gmail.com),  
[rillia@wiraraja.ac.id](mailto:rillia@wiraraja.ac.id)

**Abstract**

*Disaster Management is all efforts that include the establishment of development policies that are at risk of disasters, rehabilitation, reconstruction and emergency response in Law number 24 of 2007. Sumenep Regency is prone to five types of natural disasters, namely floods, tornadoes, landslides, abrasion Sea, And Drought. A disaster that is currently difficult to reach and difficult to handle is the drought disaster, especially in the Sumenep Islands area. This is what prompted the Sumenep Regency Government to issue Regional Regulation No. 6 of 2013 concerning Disaster Management. The aim is to implement systematic, integrated and coordinated disaster management. The aim of Disaster Management is to provide protection to the community from the threat of disasters, implement existing laws and regulations, ensure the implementation of planned, integrated, coordinated and comprehensive disaster management, respect local culture, build public and private participation and partnerships. BPBD Sumenep Regency Disaster Management is conducting data collection on areas in Sumenep Regency that are vulnerable to all natural disasters that have the potential to occur in Sumenep Regency, including floods, droughts, landslides, earthquakes, tornadoes and fires. Sumenep Regency Disaster Identification Report Contains Disaster Data. Identification of Disaster Prone Areas is Useful for Anticipating and Providing Protection to Communities in Disaster Prone Areas from Danger Threats as well as Increasing Disaster Preparedness and Reducing the Number of Risk Disaster Victims.*

**Keywords:** Implementation, Disaster Management

**Abstract**

Penanggulangan Bencana Merupakan Segala Upaya Yang Meliputi Penetapan Kebijakan Pembangunan Yang Beresiko Timbulnya Bencana, Rehabilitasi, Rekontruksi Dan Tanggap Darurat Dalam Undang-Undang nomor 24 Tahun 2007. Kabupaten Sumenep Rawan Terhadap Lima Jenis Bencana Alam, Yakni Banjir, Angin Puting Beliung, Tanah Longsor, Abrasi Laut, Dan Kekeringan. Bencana Yang Sampai Saat Ini Sulit Dijangkau Dan Sulit Untuk Ditangani Yakni Bencana Kekeringan, Terutama Di Daerah Kepulauan Sumenep Hal Inilah Yang Mendorong Pemerintah Kabupaten Sumenep Menerbitkan Peraturan Daerah No 6 Tahun 2013. Tentang Penanggulangan Bencana. Tujuan Agar Terselenggarannya Penanggulangan Bencana Yang Sistematis Terpadu Dan Terkordinasi. Tujuan Dari Penanggulangan Bencana Adalah Memberikan Perlindungan Kepada Masyarakat Dari Acaman Bencana, Melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan Yang Sudah Ada,

Menjamin Terlaksananya Penanggulangan Bencana Secara Terencana, Terpadu, Terkoordinasi, Dan Menyeluruh, Menghargai Budaya Lokal, Membangun Partisipasi Dan kemitraan Publik Dan Swasta. Penanggulangan Bencana BPBD Kabupaten Sumenep Melakukan Pendataan Daerah-Daerah Di Kabupaten Sumenep Yang Rentan Dengan Segala Bencana Alam Yang Berpotensi Terjadi Di Kabupaten Sumenep Diantaranya Banjir, Kekeringan, Tanah Longsor, Gempa Bumi, Angin Puting Beliung, Dan Kebakaran. Laporan Identifikasi Bencana Kabupaten Sumenep Berisikan Tentang Data-Data Bencana. Identifikasi Daerah Rawan Bencana Tersebut Berguna Untuk Mengantisipasi Serta Memberikan Perlindungan Kepada Masyarakat Yang Berada Di Daerah Rawan Bencana Dari Ancaman Bahaya Serta Meningkatkan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana Dan Mengurangi Jumlah Risiko Korban Bencana.

**Kata Kunci : Implementasi, Penanggulangan Bencana**



## 1. PENDAHULUAN

Bencana Alam Terjadi Hampir Sepanjang Tahun Diberbagai Belahan Dunia, Termasuk Di Indonesia,.., Indonesia Merupakan Salah Satu Negara Dengan Tingkat Kerawanan Tinggi Terhadap Berbagai Ancaman Bencana Alam. Bencana Alam Banjir, Tanah Longsor, Dan Degradasi Lahan Memiliki Frekuensi Kejadian Sasngat Tinggi Di Indonesia. Posisi Geografis Indonesia Di Daerah Tropis Terletak Di Antara Dua Benua Dan Dua Samudra Menjadikan Indonesia Memiliki Sistem Cuaca Dan Iklim Kontinen Maritim Yang Khas.. Meskipun Pola Iklim Terjadi Pergiliran Teratur Seperti Bergantinya musim Hujan Dan Musim Kemarau, Jika Terjadi Gangguan Tropis, Sering Timbul Cuaca Ekstrim Yang Dapat Memicu Terjadinya Bencana Alam (Ramli, 2020).

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Pasal 1 Ayat Menyebutkan Bahwa Bencana Adalah Peristiwa Yang Mengancam Dan Mengganggu Kehidupan Masyarakat Yang Disebabkan, Baik Oleh Faktor Alam, Faktor Nonalam, Dan Faktor ]Manusia Yang Mengakibatkan Timbulnya Korban[ Jiwa, Kerusakan Lingkungan, Kerugian Harta Benda, Dan Dampak

Psikologis. Bencana Terjadi Karena Ada Ancaman, Dampak, Dan Kerentanan (UU No 24, 2007a).

Penanggulangan Bencana Merupakan Segala Upaya Yang Meliputi Penetapan Kebijakan Pembangunan Yang Beresiko Timbulnya Bencana, Rehabilitasi, Rekontruksi Dan Tanggap Darurat Dalam Undang-Undang nomor 24 Tahun 2007. Tanggap Darurat Merupakan Serangkaian Kegiatan Yang Dilakukan Dengan Segera Pada Saat Kejadian Bencana Untuk Menangani Dampak Buruk Yang Ditimbulkan, Yang Meliputi Kegiatan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban, Harta Benda, Pemenuhan Kebutuhan Dasar, Perlindungan Pengurusan bPengungsi, Penyelamatan, Serta Pemulihan Prasarana Dan Sarana (ramli, 2020).

Tujuan Dari Penanggulangan Bencana Adalah Memberikan Perlindungan Kepada Masyarakat Dari Acaman Bencana, Melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan Yang Sudah Ada, Menjamin Terlaksananya Penanggulangan Bencana Secara Terencana, Terpadu, Terkoordinasi, Dan Menyeluruh, Menghargai Budaya Lokal, Membangun Partisipasi Dankemitraan Publik Dan Swasta, Mendorong Semangat Gotong Royong, Kesetiakawanan, Kedermawaan Dan

Menciptakan Perdamaian Dalam Kehidupan Bermasyarakat, Bangsa Dan Negara (UU no 24, 2007b).

Dari Aspek Pendanaan, Kebencanaan Bukan Hanya Menjadi Isu Lokal Atau Nasional, Namun Dapat Pula Menjadi Isu Global Hingga Melibatkan Pihak Internasional. Komunitas Internasional Dapat Mendukung, Pemerintah Indonesia Dalam Membangun Manajemen Penanggulangan Bencana Menjadi Lebih Baik. Di Sisi Lain, Kepedulian Dan Keseriusan Pemerintah Indonesia Terhadap Masalah Bencana Sangat Tinggi Dengan Dibuktikan Dengan Penganggaran Yang Signifikan Khususnya Untuk Pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana Dalam Pembangunan. Terdapat Beberapa Pendanaan Terkait Dengan Penanggulangan Bencana Di Indonesia, Antara Lain Yaitu Dana DIPA (APBN/APBD), Dana Kontijensi, Dana On-Call, Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah, Dana Yang Bersumber Dari Masyarakat, Serta Dana Dukungan Komunitas Internasional (Galuh shinta, 2021).

Kegiatan Pencegahan Bencana Merupakan Serangkaian Kegiatan Yang Dilakukan Sebagai Upaya Untuk Menghilangkan Dan/Atau Mengurangi Ancaman Bencana (UU Nomor 24

Tahun 2007 Pasal 1 Ayat (6). Pencegahan Merupakan Suatu Upaya Preventif Dalam Mengelola Ancaman Dan Kerentanan Dari Risiko Bencana Yang Tertuang Dalam Program-Program Di Masyarakat Di Tingkat Local Maupun Daerah Di Tingkat Kabupaten Untuk Menghilangkan Secara Total Ancaman Dan Kerentanan Penyebab Risiko Bencana (enza & nur inna, 2020).

BPBD Kabupaten Sumenep Juga Telah Melaksanakan Kegiatan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB). Kegiatan Ini Di Laksanakan Di 3 Lokasi Sekolah Dan Madrasah Di Kabupaten Sumenep, Diantaranya Di SDN Pabian III, SDN Pangarangan I Dan Di Mts Al Karimiyyah Beraji (Suksesi Nasional, 2022). Kegiatan Ini Bertujuan Untuk Menanggulangi Terjadinya Bencana Dengan Harapan Para Siswa Senantiasa Menjaga Lingkungannya, Salah Satunya Dengan Membiasakan Membuang Sampah Pada Tempatnya. Dan Kebiasaan Baik Tersebut Tidak Hanya Dilakukan Di Sekolah, Namun Juga Dilakukan Di Rumah Dan Dilingkungan Tempat Tinggalnya (sukses nasional, 2022).

### **Tabel 1.1**

**Kegiatan Sosialisasi Edukasi  
Penanggulangan Bencana di Kab.  
Sumenep**

Satuan Pendidikan Aman Bencana		
NO	Nama Lembaga	Kegiatan
1	SDN PABIAN III	Memberi Materi Terkait Bencana
2	SDN Pangarangan I	Memberi Materi Dan Simulasi Terkait Kebencanaan Seperti Banjir Dan Angin Puting Beliung
3	Mts Al Karimiyah Beraji	Memberi Materi Penanggulangan Bencana Di Lingkungan Sekolah Dan Sekitar

Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2023

**Bencana Di Kabupaten Sumenep**

Dinyatakan Rawan Terhadap Lima Jenis Bencana Alam, Yakni Banjir, Angin Puting Beliung, Tanah Longsor, Abrasi Laut, Dan Kekeringan. Bencana Yang Sampai Saat Ini Sulit Dijangkau Dan Sulit Untuk Ditangani Yakni Bencana Kekeringan, Terutama Di Daerah Kepulauan Sumenep (Basri, 2022).

Pihak BPBD Kabupaten Sumenep Mengakui Belum Memiliki Personel Khusus Di Wilayah Kepulauan Untuk Menangani Bencana Kekeringan Tersebut. Selain Itu, Bencana Yang Masih Sampai Saat Ini Kerap Kali Terjadi Yakni Bencana Banjir Seperti Yang Melanda Kecamatan Ganding Sumenep Hingga Mengakibatkan

Kerusakan Bangunan Rumah Dan Pondok Pesantren (ahmad rahman, 2021).

## 1. TINJAUAN TEORITIS

### Administrasi Publik

Menurut Siagian (Syafri 2012; 9) Administrasi Didefinisikan Sebagai Keseluruhan Proses Sama Antar Dua Orang Manusia Atau Lebih Yang Didasarkan Atas Rasionalitas Tertentu Untuk Mencapai Tujuan Yang Telah Ditentukan Sebelumnya.

Menurut Handyaningrat (2002:2) Pengertian Administrasi Yaitu Administrasi Secara Sempit Berasal Dari Kata Administratie (Bahasa Belanda) Yaitu Meliputi Kegiatan Catat Mencatat, Surat-Menyurat, Pembukuan Ringan, Ketik-Mengetik, Agenda Dan Sebagainya Yang Bersifat Teknis Ketatausahaan (Clerical Work). Dari Defenisi Ini Disimpulkan Administrasi Dalam Arti Sempit Merupakan Kegiatan Ketatausahaan Yang Meliputi Kegiatan Catat Mencatat, Surat Menyurat, Pembukuan Dan Pengarsipan Surat Serta Hal-Hal Lainnya Yang Dimaksudkan Untuk Menyediakan Informasi Serta Mempermudah Memperoleh Informasi Kebali Jikadibutuhkan.

### Kebijakan Publik

Carl Friedrich, 1969 Dalam Leo Agustino (2006:7) Mengatakan Bahwa

Kebijakan Adalah Serangkaian Tindakan/Kegiatan Yang Diusulkan Oleh Seseorang, Kelompok, Atau Pemerintah Dalam Suatu Lingkungan Terutama Dimana Terdapat Hambatan-Hambatan Dan Kemungkinan-Kemungkinan Dimana Kebijakan Tersebut Diusulkan Agar Berguna Dalam Mengatasinya Untuk mencapai Tujuan Yang Diamaksud.

Menurut Bridgeman Dan Davis (Suharto, 2007:5) Menerangkan Bahwa Kebijakan Publik Setidaknya Memiliki Tiga Dimensi Yang saling Bertautan, Yakni Sebagai Tujuan (Objective), Sebagai Pilihan Tindakan Yang Legal Atau Sah Secara Hukum (Authoritative Choice), Dan Sebagai Hipotesis (Hypothesis).

### **Implementasi Kebijakan**

Browne Dan Wildavsky (Usman, 2004:7) Mengemukakan Bahwa "Implementasi Adalah Perluasan Aktivitas Yang Saling Menyesuaikan". Implementasi Merupakan Suatu Rangkaian Aktivitas Dalam Rangka Menghantarkan Kebijakan Kepada Masyarakat Sehingga Kebijakan Tersebut Dapat Membawa Hasil Sebagaimana Diharapkan. Rangkaian Kegiatan Tersebut Mencakup, Pertama Persiapan Seperangkat Peraturan Lanjutan Yang Merupakan Interpretasi Dari Kebijakan Tersebut. Kedua,

Menyiapkan Sumber Daya Guna Menggerakkan Kegiatan Implementasi Termasuk Di Dalamnya Sarana Dan Prasarana, Sumber Daya Keuangan Dan Tentu Saja Penetapan Siapa Yang Bertanggung Jawab Melaksanakan Kebijaksanaan Tersebut. Ketiga, Bagaimana Menghantarkan Kebijaksanaan Secara Kongkrit Ke Masyarakat.

Menurut Daniel A. Mazmanian Dan Paul A. Sabatier Dalam Wahab (2005:65) Menjelaskan Makna Implementasi Ini Dengan Mengatakan Bahwa Memahami Apa Yang Senyatanya Terjadi Sesudah Suatu Program Dinyatakan Berlaku Atau Dirumuskan Merupakan Fokus Perhatian Implementasi Kebijaksanaan, Yakni Kejadian-Kejadian Dan Kegiatan-Kegiatan Yang Timbul Sesudah Disahkannya Pedoman-Pedoman Kebijaksanaan Negara, Yang Mencakup Baik Usaha-Usaha Untuk Mengadministrasikan Maupun Untuk Menimbulkan Akibat/Dampak Nyata Pada Masyarakat Atau Kejadian-Kejadian.

### **Penanggulangan Bencana**

Penanggulangan Bencana Adalah Segala Upaya Kegiatan Yang Dilakukan Meliputi Kegiatan Pencegahan, Penjinakan (Mitigasi), Penyelamatan, Rehabilitasi Dan Rekonstruksi, Baik Sebelum, Pada Saat Maupun Setelah Bencana Dan

Menghindarkan Dari Bencana Yang Terjadi (Iwan Setiawan, 2006).

## **METODE PENELITIAN**

Metode Penelitian Ini Menggunakan Metode Penelitian Kualitatif Menurut Moleong (1993) "Penentuan Fokus Penelitian Akan Membatasi Studi Sehingga Penentuan Tempat Penelitian Menjadi Objek Dan Penentuan Fokus, Yang Tepat Akan Mempermudah Menyaring Informasi Yang Masuk. Kegiatan Yang Dilakukan Dalam Mengumpulkan Data Yang Erat Hubungannya Bagaimanakah Upaya Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Sumenep, Yang Dapat Digunakan Sebagai *Grand Theory* Atau Teori Untuk Acuan Dasar Dalam Menjawab Rumusan Masalah Bagaimanakah Upaya Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Sumenep Dengan Teknik Pengumpulan Data Berupa Observasi, Wawancara Dan Dokumentasi, Dan Teknik Analisis Data Berupa Pengumpulan Data, Reduksi Data (*Data Reduction*), Penyajian Data (*Data Display*) Dan Penarikan Kesimpulan Atau Verifikasi Data.

## **2. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **a. Profil Singkat BPBD kabupaten Sumenep**

Pada tahun 2012 Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep merencanakan pembentukan Badan Penanggulangan

Bencana Daerah (BPBD) Sumenep, pembentukan BPBD memang sangat perlu dilakukan, untuk menangani bencana alam di Kabupaten Sumenep, sebab dengan adanya lembaga tersebut, memudahkan Pemerintah Daerah dalam mengajukan bantuan bencana pada Pemerintah Propinsi maupun pemerintah pusat (Room news, 2011).

Pemerintah Kabupaten Sumenep menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten sumenep nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD admin, 2020).

### **b. Hasil Penelitian**

Berdasarkan Teori Fokus Yang Sudah Peneliti Tetapkan Diatas Agar Terperinci Dan Terurai Secara Berurutan, Maka Akan Disajikan Sesuai Dengan Kajian Pembahasan Hasil Penelitian Yang Sesuai Dengan Fenomena Hasil Lapangan Yang Sesuai Dengan Kajian Teori Fokus Yang Diteliti.

### **Standar Dan Sasaran Kebijakan**

Sasaran Kebijakan Atau Tujuan Kebijakan Dalam Upaya Penanggulangan Bencana Sudah Tepat Yakni Dengan Adanya Peraturan Daerah No 6 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan Bencana. Perda Ini Sudah Direalisasikan Ke Berbagai Daerah Kabupaten Sumenep Yang Bertujuan Untuk Mengantisipasi Serta Memberikan Pelindungan Kepada Masyarakat Yang Berada Di Daerah

Rawan Bencana, Ancaman Bahaya Serta Meningkatkan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana Dan Mengurangi Umlah Resiko Bencana.



Hal Ini Sesuai Dengan Teori Yang Dikemukakan Oleh Van Meter Dan Van Horn Yakni Kinerja Implementasi Kebijakan Dapat Diukur Tingkat Keberhasilannya Dari Ukuran Dan Tujuan Kebijakan Yang Bersifat Realistis Dengan Sosio-Kultur Yang Ada Dilevel Pelaksana Kebijakan. Ketika Ukuran Dan Sasaran Kebijakan Terlalu Ideal (Utopis), Maka Akan Sulit Direalisasikan.

Standar Dan Sasaran Kebijakan Yang Sudah Dikeluarkan Sudah Jelas Dengan Melihat Implementasi Kebijakan Dari Adanya Peraturan Tersebut Salah Satunya Seperti Melakukan Pendataan Daerah-Daerah Di Kabupaten Sumenep Yang Rentan Dengan Segala Bencana Alam Yang Berpotensi Terjadi Di Kabupaten Sumenep.

Berdasarkan Hasil Wawancara Di Atas Penulis Dapat Menyimpulkan Bahwa Standar Dan Sasaran Kebijakan Yang Sudah Dikeluarkan Sudah Jelas Dengan Melihat Implementasi Kebijakan Dari

Adanya Peraturan Tersebut Salah Satunya Seperti Melakukan Pendataan Daerah-Daerah Di Kabupaten Sumenep Yang Rentan Dengan Segala Bencana Alam Yang Berpotensi Terjadi Di Kabupaten Sumenep. Dengan begitu masyarakat dapat terbantu dengan adanya peraturan tersebut banyak masyarakat yang menerima dengan antusias kebijakan yang dikeluarkan oleh BPBD kabupaten sumenep.

### **Sumber Daya**

Van Meter Dan Van Horn Mengemukakan Bahwa Keberhasilan Implementasi Kebijakan Sangat Tergantung Dari Kemampuan Memanfaatkan Sumber Daya Yang Tersedia. Manusia Merupakan Sumber Daya Yang Terpenting Dalam Menentukan Keberhasilan Suatu Implementasi Kebijakan. Setiap Menuntut Adanya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Sesuai Dengan Pekerjaan Yang Disyaratkan Oleh Kebijakan Yang Telah Ditetapkan Secara Politik. Selain Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Finansial Dan Fasilitas Menjadi Pertimbangan Penting Dalam Keberhasilan Implementasi Kebijakan. Sumber Daya Yang Dimiliki BPBD Yaitu Sumber Daya Manusia, Fasilitas Dan Finansial Yang Dimiliki Oleh BPBD Kabupaten Sumenep Dalam Menjalankan Tugasnya Masih Terdapat Kekurangan Meskipun Dapat Dikatakan Sudah Cukup Baik Sebagai

Penyelenggara Penanggulangan Bencana  
Di Daerah.



Kekurangan tersebut seperti Daerah-Daerah yang sulit dijangkau seperti Daerah Kepulauan yang masih mengalami kekeringan. Sumber Daya Manusia BPBD Kabupaten Sumenep sebenarnya sudah maksimal dan memadai, hanya saja keluhan masyarakat yang jauh dari jangkauan perlu di evaluasi dan diselesaikan dalam penanggulangan bencana apalagi masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa sumber daya di BPBD Kabupaten Sumenep sudah cukup, hanya saja terkendala di sarana dan fasilitas yang menunjang dalam menanggulangi bencana, sehingga BPBD memerlukan kerjasama dari berbagai pihak seperti pemerintah dan masyarakat yang dapat membantu mempermudah kendala-kendala yang dihadapi seperti dalam hal ini yakni sarana dan fasilitas yang kurang memadai.

### **Karakteristik Organisasi Pelaksana**

Sifat atau karakteristik para pelaksana dalam hal ini para agen pelaksana atau dinas terkait pernah adanya observasi ke Kelurahan-Kelurahan dan sering melakukan komunikasi dengan Kelurahan terkait maupun Kecamatan. Konteks kebijakan yang akan dilaksanakan pada beberapa kebijakan pelaksanaan kebijakan yang ketat dan tegas. Pada konteks lain yang diperlukan agen pelaksana yang demokratis dan persuasif. Selain itu, coverage atau luas wilayah menjadi pertimbangan penting dalam menentukan agen pelaksana kebijakan.

Sikap para pelaksana atau pegawai/staf BPBD Kabupaten Sumenep cukup sigap dalam merespon perintah dari atasan sesuai dengan keadaan baik dalam situasi darurat kebencanaan maupun dalam waktu senggang walaupun dengan keterbatasan yang ada, hanya mengandalkan salam tangguh yang dimiliki oleh BPBD kemudian semangat dari para pegawai/staf BPBD sehingga mereka cukup mampu melaksanakan penanggulangan bencana di daerah.

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa karakteristik organisasi pelaksana sudah terjalin dengan baik, hal ini sebagaimana diungkapkan oleh kepala bidang pencegahan dan kesiapsiagaan

BPBD Kabupaten Sumenep Bahwa Kinerja Setiap Bidang Selalu Di Kontrol Oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sumenep Serta Selalu Berbaur Dan Memberikan Semangat Kepada Bawahan-Bawahannya.

### **Komunikasi Antar Organisasi**

Komunikasi Yaitu Interaksi Yang Menekankan Bahwa Setiap Kebijakan Akan Dapat Dilaksanakan Dengan Baik Jika Terjadi Penyampaian Informasi Yang Efektif Antara Pelaksana Implementor Dengan Para Kelompok Sasaran (Masyarakat). Menurut Edward III, Proses Komunikasi Kebijakan Dapat Dipengaruhi Tiga Hal Penting, Yaitu Transmisi, Kejelasan, Dan Konsistensi.



Indikator Komunikasi, Masih Belum Berjalan Dengan Optimal. Hal Tersebut Dapat Ditemukan Masih Sering Terjadi Bencana Kekeringan Di Daerah Kepulauan Sumenep. Hal Ini Disebabkan Kurangnya Komunikasi, Evaluasi Dan Sosialisasi Yang Optimal Yang Dilakukan Oleh BPBD Kabupaten Sumenep.

Adapun Komunikasi Yang Optimal Sangat Membantu Meminimalisir Terjadinya Bencana Seperti Kekeringan. Adanya Bentuk Koordinasi Dan Komunikasi Yang Dilakukan Oleh Pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Dengan Pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi, TNI, POLRI, Manggala Agni, Satgas Kecamatan, Satgas Desa.

Berdasarkan Hasil Wawancara Di Atas Penulis dapat Menyimpulkan komunikasi antar Komunikasi, Masih Belum Berjalan Dengan Optimal. Hal Tersebut Dapat Ditemukan Masih Sering Terjadi Bencana Kekeringan Di Daerah Kepulauan Sumenep. Hal Ini Disebabkan Kurangnya Komunikasi, Evaluasi Dan Sosialisasi Yang Optimal Yang Dilakukan Oleh BPBD Kabupaten Sumenep.

Adapun Komunikasi Yang Optimal Sangat Membantu Meminimalisir Terjadinya Bencana

### **Disposisi Sikap Pelaksana**

Sikap Pelaksana Dipengaruhi Oleh Pendangannya Terhadap Suatu Kebijakan Dan Cara Melihat Pengaruh Kebijakan Itu Terhadap Kepentingan-Kepentingan Organisasinya Dan Kepentingan-Kepentingan Pribadinya.

Menurut Van Mater Dan Van Horn Dalam Buku Politik Dan Kebijakan Publik (Agustinus, 2006:162) Menjelaskan Disposisi Bahwa Implementasi Kebijakan

Diawali Penyaringan (Befiltered) Lebih Dahulu Melalui Persepsi Dari Pelaksana (Implementors) Dalam Batas Mana Kebijakan Itu Dilaksanakan. Terdapat Tiga Macam Elemen Respon Yang Dapat Mempengaruhi Kemampuan Dan Kemauannya Untuk Melaksanakan Suatu Kebijakan, Antara Lain Terdiri Dari Pertama, Pengetahuan (Cognition), Pemahaman Dan Pendalaman (Comprehension Andunder Standing) Terhadap Kebijakan, Kedua, Arah Respon Mereka Apakah Menerima, Netral Atau Menolak (Acceptance, Neutrality, Andrejection), Dan Ketiga, Intensitas Terhadap Kebijakan .Pemahaman Tentang Maksud Umum Dari Suatu Standar Dan Tujuan Kebijakan Adalah Penting.

Karena, Bagaimana Pun Juga Implementasi Kebijakan Yang Berhasil, Bisa Jadi Gagal (Frustrated) Ketika Para Pelaksana (Officials), Tidak Sepenuhnya Menyadari Terhadap Standar Dan Tujuan Kebijakan. Arah Disposisi Para Pelaksana (Implementors) Terhadap Standar Dan Tujuan Kebijakan. Arah Disposisi Para Pelaksana (Implementors) Terhadap Standar Dan Tujuan Kebijakan Juga Merupakan Hal Yang Krusial.

Disposisi Atau Kecenderungan Para Agen Pelaksana Cukup Baik Karena Dari Beberapa Kebijakan Yang Sudah Dilaksanakan, Telah Adanya Upaya Dari Para Agen Pelaksana Atau Pemangku

Kepentingan Terkait memberikan arahan kepada bawahannya.

Berdasarkan Hasil Wawancara Di Atas Penulis dapat Menyimpulkan bahwa Disposisi Atau Kecenderungan Para Agen Pelaksana Cukup Baik Karena Dari Beberapa Kebijakan Yang Sudah Dilaksanakan, Telah Adanya Upaya Dari Para Agen Pelaksana Atau Skateholder Terkait dalam memberikan arahan kepada bawahannya.

### **Lingkungan Sosial, Ekonomi Dan Politik**

Menurut Van Meter Dan Van Horn Sejauh Mana Lingkungan Sosial, Ekonomi Dan Politik Mendorong Terciptanya Keberhasilan Kebijakan Publik Sesuai Yang Telah Ditetapkan. Penelitian Ini Diamati Dari Kondisi Lingkungan Sebagai Pendukung Keberhasilan Implementasi Kebijakan. Lingkungan Sosial, Ekonomi Dan Politik Yang Tidak Kondusif, Akan Berpengaruh Dan Menjadi Potensi Kegagalan Kinerja Implementasi Kebijakan Publik. Karena Itu, Keberhasilan Pelaksanaan Kebijakan Sangat Ditentukan Adanya Dukungan Dan Lingkungan Yang Kondusif.

Lingkungan Sosial, Ekonomi Dan Politik Dalam Hal Ini Merupakan Kesadaran Masyarakat Dan Tanggapan Masyarakat Mengenai Kebijakan Penanggulangan Bencana. Dalam Hal Ini Masyarakat Antusias Dalam Membantu

Terjadinya Bencana Meskipun Dari BPBD Kabupaten Sumenep Sendiri Masih Kekurangan Fasilitas Seperti Mobil Pemadam Jika Terjadi Kebakaran Di Daerah Yang Jauh Dari Jangkauan Pusat. Meskipun Begitu, Masyarakat Tetap Peduli Terhadap Lingkungannya Jika Terjadi Bencana.



Berdasarkan Hasil Wawancara Di Atas Penulis dapat Menyimpulkan bahwa Lingkungan Sosial, Ekonomi Dan Politik Sangat Didukung Dan Dibantu Oleh Masyarakat, Karena Antusias Yang Sangat Tinggi Dalam Membantu Korban-Korban Bencana, Sehingga BPBD Kabupaten Sumenep Terbantu Dalam Mengupayakan Penanggulangan Bencana.

## **PENUTUP**

### **a. Kesimpulan**

Berdasarkan Hasil Penelitian Mengenai Yang Telah Dilakukan Baik Melalui Wawancara, Observasi Dan Dokumentasi, Di Analisis Dan Dikaji Pada Pembahasan, Maka Kesimpulannya Yakni Sebagai Berikut: Standar Dan Sasaran Kebijakan Dalam Upaya Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Sumenep Sudah Tepat Yakni Adanya Peraturan Daerah Kabupaten

Sumenep Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan Bencana.

Sumber Daya Seperti Dana, Tenaga Kerja Dan Sarana Prasarana Dalam Upaya Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Sumenep Sudah Cukup Optimal, Tetapi Masih Perlu Evaluasi Dan Kinerja Yang Lebih Optimal Lagi Dalam Menanggulangi Bencana Yang Sulit Dijangkau.

Karakteristik Organisasi Pelaksana Cukup Baik Dalam Merespon Perintah Dari Atasan Sesuai Dengan Keadaan Baik Dalam Situasi Darurat Kebencanaan Maupun Dalam Waktu Senggang Walaupun Dengan Keterbatasan Yang Ada.

Komunikasi Dengan Masyarakat Kepulauan Masih Belum Optimal Karena Titik Jangkauan Yang Sulit Untuk Di Upayakan. Selebihnya, Komunikasi Agen Pelaksana Dengan Pihak Kecamatan Dan Kelurahan Berjalan Sangat Baik Namun Bersifat Kondisional, Begitupun Komunikasi Dengan Masyarakat.

Disposisi Atau Kecenderungan Para Agen Pelaksana Cukup Baik Karena Dari Beberapa Kebijakan Yang Sudah Dilaksanakan, Telah Adanya Upaya Dari Para Agen Pelaksana Atau Skateholder Terkait dalam memberikan arahan kepada bawahannya.

Lingkungan Sosial, Ekonomi Dan Politik Sangat Didukung Dan Dibantu

Oleh Masyarakat, Karena Antusias Yang Sangat Tinggi Dalam Membantu Korban-Korban Bencana, Sehingga BPBD Kabupaten Sumenep Terbantukan Dalam Mengupayakan Penanggulangan Bencana

#### **b. Saran**

Pemerintah Dan BPBD Kabupaten Sumenep Perlu Membuat Program Khusus Dalam Menanggulangi Bencana Yang Masih Belum Atau Kurang Optimal, Seperti Bencana Kekeringan Dan Kebakaran Yang Daerahnya Sulit Dijangkau.

Masyarakat Yang Antusias Dalam Membantu Korban Bencana Sepatutnya Diberikan Penghargaan Dengan Maksud Agar Masyarakat Lain Lebih Peduli Terhadap Lingkungan Sekitar Dari Terjadinya Bencana.

Diharapkan Fasilitas, Sarana Dan Prasarana Yang Masih Belum Memadai Atau Maksimal Untuk Disediakan Dan Direalisasikan. Memberikan Edukasi Kepada Masyarakat Yang Tinggal Di Daerah Rawan Bencana Setiap 6 Bulan Sekali

Meningkatkan Sinergitas Dengan Lembaga Masyarakat Dengan Tujuan Untuk Mempermudah Atau Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Penanggulangan Bencana. Melakukan Peningkatan Kompetensi Pejabat Struktural Agar Dapat Menjadi Contoh Bagi Anggota BPBD Lainnya

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Abdul Basri,  
<https://radarmadura.jawapos.com/sumenep/17/09/2022/24-desarawan-kekeringan/>, *Dropping Air Sulit Jangkau Wilayah Kepulauan 24 Desa Rawan Kekeringan.*

Ahmad Rahman,  
<https://news.detik.com/berita-jawatimur/d-5481465/hujan-lebat-di-sumenep-banjiri-2-desadan-rusak-ponpes>, *Hujan Lebat di Sumenep Banjiri 2 Desa dan Rusak Ponpes.*  
Benjamin Bukit, dkk.  
Pengembangan Sumber Daya Manusia. (Yogyakarta: Zahir Publishing. 2017).

Dian Tamitiadini, Dan Isma Adila .  
Wayan Weda Asmara Dewi. Komunikasi Bencana : Teori Dan Pendekatan Studi Kebencanaan Di Indonesia.

Elbadiansyah. *Manajemen Sumber Daya Manusia.* (Malang: CV IRDH. 2019)

Enza Resdiana dan Nur Inna Alfiah,  
*Upaya Peningkatan Kesadaran, Kewaspadaan dan Kesiapsiagaan dalam Menghadapi Bencana Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumenep.* 2020  
Nur Aisyah Lusiana, Mitigasi Bencana Sebagai Upaya Pengurangan Dampak Bencana Banjir Di Kabupaten Lamongan.

Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana

Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana